

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **2.1 Sistem Informasi Akuntansi**

##### **2.1.1 Pengertian Sistem Informasi Akuntansi**

Sistem merupakan susunan beberapa komponen yang saling berhubungan untuk mewujudkan suatu tujuan. Sistem mencakup beberapa komponen yaitu berupa subsistem yang berfungsi sebagai pendukung. Sedangkan informasi adalah data berupa fakta yang telah diolah untuk membantu organisasi dalam menentukan suatu keputusan. Akuntansi adalah proses pencatatan, penyajian, pengembangan, dan pengukuran data. Dengan demikian, Sistem Informasi Akuntansi adalah suatu sistem yang digunakan oleh organisasi dalam rangka untuk mengumpulkan, mengolah dan menyimpan data sehingga dapat menghasilkan berbagai informasi untuk membantu dalam pengambilan keputusan (Romney, M. B., & Steinbart, 2015).

##### **2.1.2 Komponen Sistem Informasi Akuntansi**

Menurut Romney, Marshall B. dan Steinbart (2015) terdapat enam komponen Sistem Informasi Akuntansi (SIA) yang saling mendukung satu sama lain, yaitu sebagai berikut:

1. Orang sebagai pengguna sistem.

2. Teknologi informasi dan komunikasi seperti komputer, laptop, *smartphone*, dan jaringan.
3. Pengendalian internal dan pengawasan yang berfungsi untuk menjaga data Sistem Informasi Akuntansi.
4. Prosedur sebagai pedoman untuk mengumpulkan, mencatat, mengolah, dan menyimpan data.
5. Data dan kegiatan operasional organisasi.
6. *Software* untuk membantu dalam pengolahan data.

Dari keenam komponen di atas maka SIA dapat memungkinkan untuk memenuhi tiga fungsi berikut ini:

1. Mengumpulkan, mengolah dan menyimpan data tentang sumber daya, aktivitas bisnis, dan anggota organisasi.
2. Mengkonversikan suatu data menjadi informasi agar manajemen dapat mengolah dan memantau kegiatan perusahaan. Selain itu, manajemen dapat mengevaluasi sumber daya, aktivitas bisnis, dan anggota organisasi.
3. Menerapkan pengendalian internal yang tepat untuk melindungi data dan aset organisasi.

## **2.2 Sistem Pengendalian Internal**

### **2.2.1 Pengertian Sistem Pengendalian Internal**

Sistem pengendalian internal adalah proses dalam organisasi untuk menjamin jika tujuan pengendalian internal suatu organisasi telah tercapai antara lain melindungi aset, menghasilkan laporan aset yang wajar dan akurat, memberikan informasi yang *reliable*, menghasilkan laporan keuangan yang sesuai

dengan tolak ukur organisasi, mendorong efektivitas kegiatan organisasi, mendorong ketaatan terhadap kebijakan manajerial organisasi, dan patuh terhadap hukum serta peraturan yang berlaku (Romney, M. B., & Steinbart, 2015).

Sistem pengendalian internal menurut Mulyadi (2016:129) meliputi berbagai unsur yaitu struktur organisasi, ukuran dan metode yang digunakan untuk melindungi kekayaan organisasi, mengecek kebenaran data akuntansi untuk menghasilkan laporan keuangan yang akurat, meningkatkan efektivitas, dan dilaksanakannya kebijakan manajemen yang dibuat oleh organisasi (Laily, 2018).

### **2.2.2 Komponen Sistem Pengendalian Internal**

The Committee of Sponsoring Organizations (COSO) menyebutkan ada lima komponen sistem pengendalian internal yang saling berkaitan, yaitu sebagai berikut:

#### **1. Lingkungan Pengendalian**

Lingkungan pengendalian mencakup berbagai faktor yang dijadikan landasan dari keempat sistem pengendalian internal lainnya karena dapat mempengaruhi cara organisasi dalam menentukan rencana dan tujuannya. Lingkungan pengendalian terdiri dari filosofi dan gaya manajemen, komitmen terhadap etika dan integritas, komitmen terhadap kompetensi, pengawasan dari dewan direksi atas pengendalian internal, struktur organisasi, penugasan, SDM yang ahli dan andal, serta pengaruh eksternal. Lingkungan pengendalian yang kuat dapat menciptakan organisasi yang efektif dan terstruktur begitupun sebaliknya jika lingkungan pengendalian lemah maka akan menciptakan organisasi yang tidak terkendali.

## 2. Penaksiran Risiko

Penaksiran risiko adalah proses evaluasi sistem pengendalian internal organisasi dalam rangka pencegahan atau pendeteksian salah saji material dan menjamin bahwa sistem tersebut telah berjalan dengan optimal. Manajemen harus menganalisis risiko agar dapat mengetahui cara risiko harus dikelola dan mengidentifikasi pengendalian internal yang diperlukan untuk mencegah kesalahan dalam penyajian laporan organisasi.

## 3. Aktivitas Pengendalian

Aktivitas pengendalian adalah tanggung jawab manajemen berupa aturan dan langkah-langkah untuk memastikan bahwa tujuan pengendalian internal dan manajemen risiko dalam organisasi telah diterapkan secara optimal. Manajemen harus menjamin bahwa pengendalian internal dikembangkan melalui teknologi, dilaksanakan untuk meminimalisasi risiko, dan sesuai dengan aturan maupun kebijakan yang berlaku.

## 4. Informasi dan Komunikasi

Sistem informasi dan komunikasi adalah proses penyampaian laporan tentang kondisi finansial organisasi, aktivitas bisnis, dan kepatuhan setiap anggota organisasi terhadap peraturan dan ketentuan yang telah ditetapkan dan disetujui dalam organisasi. Sistem ini diperlukan dalam suatu organisasi untuk mengendalikan, mengatur, dan mengelola aktivitas bisnis dalam organisasi. Komunikasi penting untuk dilakukan oleh setiap anggota organisasi agar menghasilkan informasi yang memadai dan akurat sehingga tidak terjadi kesalahpahaman.

## 5. Pengawasan

Pengawasan adalah kegiatan penilaian keefektifan sistem pengendalian internal dan struktur organisasi sehingga dapat membantu manajemen dalam melaksanakan tugasnya secara optimal. Pengawasan terhadap sistem pengendalian internal yang telah ditentukan harus dilakukan secara terus-menerus dan dievaluasi secara berkala melalui evaluasi formal maupun evaluasi penilaian diri. Jika terdapat kekurangan maupun penyimpangan maka dilaporkan kepada Dewan Direksi (Romney, M. B., & Steinbart, 2015).

### 2.3 Kredit

#### 2.3.1 Pengertian Kredit

Kredit berasal dari bahasa latin *Credere* yang artinya percaya sehingga landasan pemberian kredit oleh suatu lembaga keuangan penyedia kredit dengan debitur adalah berdasarkan kepercayaan bahwa debitur tersebut akan membayar segala kewajiban yang telah disepakati dan diperjanjikan bersama di masa yang akan datang (Alfinovita, 2013). Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan, kredit adalah pemberian uang atau tagihan yang telah disetujui antara debitur dan bank atau lembaga peminjaman lainnya yang mengharuskan debitur untuk memenuhi kewajibannya beserta bunganya sesuai waktu yang telah disepakati bersama. Jika kewajiban tersebut tidak dilunasi tepat waktu maka akan mendapatkan sanksi tertentu sesuai dengan peraturan lembaga bank atau nonbank terkait. Debitur juga harus memenuhi syarat dan prosedur untuk dapat memperoleh kredit dari perbankan.

### 2.3.2 Syarat Kredit

Prosedur pemberian kredit yang dilakukan oleh lembaga keuangan harus memperhatikan prinsip-prinsip pemberian kredit dan melakukan analisis kelayakan permohonan kredit yang masuk. Hasil analisis tersebut digunakan sebagai pertimbangan dalam pengambilan keputusan, apakah kreditnya diterima atau ditolak dan menghindari kemungkinan terburuk seperti kredit macet. Berikut ini adalah prinsip-prinsip pemberian kredit 5C:

#### 1. *Character*

*Character* atau watak calon debitur sangat berpengaruh pada pemberian kredit. Penilaian *character* bertujuan untuk meyakinkan jika watak maupun sifat debitur benar-benar bisa dipercaya. Dengan adanya penilaian ini, pihak bank dapat melakukan penelitian apakah calon debitur tersebut berwatak baik atau buruk. Cara yang dilakukan pihak bank antara lain melihat latar belakang calon debitur baik secara pribadi maupun dari lingkungan sekitarnya dan melihat kebiasaan hidup calon debitur.

#### 2. *Capacity*

*Capacity* berkaitan dengan kesanggupan calon debitur dalam melunasi kewajiban dari kreditur. Untuk mengukur kapasitas tersebut maka kreditur dapat melihat kemampuan calon debitur dari segi manajemen, finansial perusahaan, dan proses produksi.

#### 3. *Capital*

Penilaian *capital* atau modal dapat digunakan untuk menilai keseriusan calon debitur dalam melaksanakan usahanya dan kemampuan dalam pembayaran

kredit. Modal debitur dapat dinilai melalui besarnya jumlah modal yang dimiliki debitur maupun banyaknya modal yang digunakan debitur dalam menjalankan usahanya. Debitur akan dinilai semakin bersungguh-sungguh dalam menjalankan bisnis maupun usahanya jika modal yang digunakan semakin banyak.

#### 4. *Collateral*

Jaminan diperlukan untuk mengikat keseriusan debitur menjalankan usaha dan membayar kewajiban kredit. Jaminan juga dibutuhkan untuk mengantisipasi apabila calon debitur tidak dapat melunasi kewajibannya sehingga pihak bank dapat memperoleh jaminan tersebut sebagai gantinya. Nilai jaminan tergantung dengan besarnya pinjaman yang diberikan kepada debitur.

#### 5. *Condition of Economy*

Dalam menilai kredit, analisis kredit harus memantau kondisi perekonomian di sekitar tempat tinggal calon debitur baik kondisi ekonomi mikro maupun makro. Penilaian kondisi perekonomian antara lain tentang luas pasar, minat masyarakat, pesaing, perkembangan teknologi, pasar modal, bahan baku, dan kondisi ekonomi lainnya. Dengan melihat keadaan perekonomian calon debitur maka dapat memprediksi prospek usaha pada masa depan dan adanya gagal bayar (Alfinovita, 2013).

### **2.3.3 Jenis-jenis Kredit**

Menurut Kasmir (2013:9093), jenis-jenis pengkreditan yang dilakukan Bank Pengkreditan Rakyat dapat ditinjau dari berbagai sisi yaitu sebagai berikut (Ananda, 2022):

#### a. Sisi kegunaan

1. Kredit investasi

Kredit investasi merupakan kredit yang digunakan oleh debitur untuk kebutuhan investasi.

2. Kredit modal kerja

Kredit modal kerja merupakan yang dimanfaatkan debitur sebagai modal usaha maupun bisnis.

- b. Sisi tujuan kredit

1. Kredit produktif

Kredit produktif merupakan kredit yang bertujuan untuk menambah penghasilan debitur seperti membeli aset untuk disewakan atau membangun sebuah rumah makan sehingga keuntungannya dapat untuk membayar kredit tersebut.

2. Kredit konsumtif

Kredit konsumtif merupakan kredit yang dimanfaatkan debitur untuk keperluan pribadi dan membiayai kebutuhan konsumtif seperti biaya pendidikan, biaya kesehatan, biaya kebutuhan sehari-hari, dan kebutuhan konsumtif lainnya.

3. Kredit perdagangan

Kredit ini digunakan oleh para pedagang dengan tujuan menambah modal dan mengembangkan kegiatan perdagangannya sehingga dapat menambah keuntungan.

- c. Sisi jangka waktu

1. Kredit jangka pendek

Kredit dengan jangka waktu peminjaman kurang dari satu tahun sehingga kredit ini memiliki kelebihan antara lain lebih mudah didapatkan, syaratnya tidak rumit, dan risiko kreditnya kecil.

#### 2. Kredit jangka menengah

Kredit jangka menengah merupakan kredit dengan jangka waktu peminjaman kurang lebih tiga tahun. Kredit ini sering digunakan oleh pelaku UMKM di bawah Rp100 juta.

#### 3. Kredit jangka panjang

Kredit dengan jangka waktu peminjaman maksimal lima tahun. Risiko dari kredit ini cukup besar sehingga syarat yang diperlukan untuk pengajuan kredit jangka panjang lebih rinci dan membutuhkan dokumen-dokumen khusus.

#### d. Sisi jaminan

##### 1. Kredit dengan jaminan

Kredit yang membutuhkan jaminan untuk memastikan jika debitur dapat melunasi pinjamannya.

##### 2. Kredit tanpa jaminan

Kredit yang tidak membutuhkan jaminan sehingga biasanya digunakan untuk pinjaman dalam skala kecil.

#### e. Sisi sektor usaha

##### 1. Kredit pertanian

Kredit yang digunakan oleh debitur untuk kegiatan pertanian seperti mengembangkan usaha pertaniannya.

## 2. Kredit peternakan

Kredit yang digunakan oleh debitur untuk mengembangkan usaha peternakan atau membiayai hal-hal yang berkaitan dengan peternakan seperti perluasan kandang, pembelian pakan, dan perawatan hewan.

## 3. Kredit industri

Kredit yang digunakan oleh debitur untuk mengembangkan usaha bidang industri maupun membiayai hal-hal yang berkaitan dengan industri. Kredit ini ditawarkan oleh kreditur untuk berbagai sektor industri sehingga industri apapun memiliki potensi untuk berkembang dengan baik.

## 4. Kredit pendidikan

Kredit pendidikan adalah kredit yang digunakan untuk biaya pendidikan seperti pembangunan sarana pendidikan, pengembangan mutu siswa, dan biaya pendidikan lainnya.

## 5. Kredit profesi

Kredit kredit yang biasanya dikeluarkan untuk profesi tertentu seperti dosen, pengacara, dan hakim.

## 6. Kredit perumahan

Kredit yang digunakan masyarakat untuk membangun, merenovasi, atau membeli rumah.

## **2.4 UMKM**

### **2.4.1 Pengertian UMKM**

UMKM menurut Rudjito adalah usaha yang mendorong roda perekonomian nasional karena dapat menciptakan lapangan kerja baru. Selain itu,

adanya pemungutan pajak badan usaha maka UMKM dapat meningkatkan devisa negara. Menurut Inna Primiana, pengertian UMKM adalah aktivitas yang berhubungan dengan perekonomian yaitu mendorong pembangunan ekonomi nasional sehingga fokus pada pertanian, sumber daya manusia, dan perindustrian (Mandala, 2020).

Sedangkan UU Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah mendefinisikan Usaha Mikro adalah usaha ekonomi yang dimiliki oleh perseorangan maupun badan usaha perseorangan sesuai dengan kriteria usaha mikro. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi yang dimiliki oleh perseorangan atau badan usaha perseorangan dan bukan merupakan anak atau cabang perusahaan yang dimiliki dan memenuhi kriteria Usaha Kecil. Usaha Menengah adalah usaha yang dimiliki oleh perseorangan atau badan usaha dan bukan merupakan anak atau cabang perusahaan dengan jumlah kekayaan bersih sesuai peraturan yang berlaku. Kriteria usaha tersebut terdapat dalam tabel di bawah ini.

Tabel II.1 Kriteria Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

<b>Kriteria</b>	<b>Usaha Mikro</b>	<b>Usaha Kecil</b>	<b>Usaha Menengah</b>
Kekayaan Bersih (Dalam rupiah)	Maksimal 50 juta	>50juta-500juta	>500juta-10M
Hasil Penjualan (Dalam Rupiah)	Maksimal 300 juta	>300juta-2,5M	>2,5M-50M

Sumber : UU Nomor 20 Tahun 2008

#### **2.4.2 Tujuan dan asas UMKM**

UMKM bertujuan membantu perekonomian nasional yang lebih baik melalui pengembangan dan pertumbuhan usaha berdasarkan demokrasi ekonomi

yang berkeadilan. Asas Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah adalah demokrasi ekonomi, kekeluargaan, kebersamaan, keadilan, berkelanjutan, keseimbangan, berwawasan lingkungan, kemajuan, kemandirian, dan kesatuan ekonomi nasional (Mandala, 2020).

## **2.5 Bank**

### **2.5.1 Pengertian Bank**

Secara etimologis, bank berasal dari bahasa Italia "Banca" yang artinya bangku. Bangku merujuk pada meja yang digunakan untuk menunjang aktivitas perbankan dalam melayani nasabah pada zaman dahulu. Istilah bangku tersebut kemudian terus berkembang hingga sampai saat ini digunakan dalam kegiatan pelayanan keuangan (Labetubun, Muchtar Anshary Hamid, 2021). Menurut UU Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, bank adalah lembaga keuangan yang tugasnya menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam berbagai bentuk seperti kredit atau bentuk-bentuk lainnya dengan tujuan mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan membantu perekonomian nasional.

### **2.5.2 Asas, Fungsi, dan Tujuan Bank**

#### **1. Asas**

Asas yang digunakan bank dalam melakukan kegiatan operasional sehari-harinya adalah demokrasi ekonomi dengan menerapkan prinsip kehati-hatian.

#### **2. Fungsi**

Fungsi utama bank adalah menghimpun dana masyarakat lalu menyalurkannya kembali ke masyarakat dalam berbagai bentuk demi kesejahteraan rakyat.

### 3. Tujuan

Tujuan bank adalah mendukung pembangunan nasional demi tercapainya pertumbuhan ekonomi yang baik (Labetubun, Muchtar Anshary Hamid, 2021).

### **2.5.3 Jenis-jenis Bank**

Jenis perbankan apabila dilihat dari fungsinya menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 pasal 5 tentang Perbankan adalah:

#### 1. Bank Umum

Bank umum merupakan bank yang melakukan kegiatan operasionalnya secara konvensional dan sesuai prinsip syariah yang dalam kegiatan operasionalnya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Pelayanan yang diberikan bersifat umum dan lebih bervariasi mulai dari simpanan, pinjaman, kartu kredit, giro, dan surat utang.

#### 2. Bank Pengkreditan Rakyat (BPR)

Bank Pengkreditan Rakyat (BPR) adalah bank yang melakukan kegiatan operasionalnya secara konvensional dan sesuai prinsip syariah yang dalam kegiatan operasionalnya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. BPR memberikan pelayanan yang lebih sedikit dibandingkan bank umum.